




# RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA JAMBI**

 0741-444015

 [Dihkota2017@gmail.com](mailto:Dihkota2017@gmail.com)

 [Dih.jambikota.go.id](http://Dih.jambikota.go.id)

**Jl. Jenderal Basuki Rahman  
No. 8 Kota Baru**

---

## KATA PENGANTAR

Puji Sukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada Rencana Strategis 2024-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Penyusunan Rencana Kerja adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dengan berorientasi pada hasil yang akan di capai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kiranya Rencana Kerja ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah selanjutnya. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, untuk itu kami mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Renja ini.

Jambi, April 2024

Kepala DLH Kota Jambi



Dr. H. ARDI, SP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19700612 199803 1004

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu .....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	II-27
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	III-3
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	IV-1
BAB V Penutup .....	V-1

---

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 .....	II-2
2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Jambi .....	II-15
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DLH Kota Jambi .....	II-27
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 .....	II-30
2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 ..	II-45
3.1 Prioritas dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi .....	III-2
3.2 Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi .....	III-3
3.3 Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi .....	III-3
3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	III-4
4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan .....	IV-2
4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 .....	IV-8

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja SKPD memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14); Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota Jambi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu :

- 
- 
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra). Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun oleh dinas. Rencana Kerja merupakan penghubung antara Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci serta merupakan alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja.

Melalui Rencana Kerja Tahunan diupayakan untuk mengadakan perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan sehingga pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (LP2P), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
  12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
  13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2005-2025;

- 
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
  15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
  16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
  17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
  18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
  19. Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Bidang Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Kerja Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
- b. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
- c. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan DLH.
- d. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran

---

berbasis kinerja guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan Kota Jambi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I   Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II   Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III  Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV  Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V   Penutup

---

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan selanjutnya dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2. Untuk program dan kegiatan Tahun 2023, Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 52.459.112.057,- terdiri dari Belanja Operasi Rp. 52.086.956.311,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 372.155.746,-. Realisasi hasil pelaksanaan dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 50.995.319.563,- atau terserap 97,21%, terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp. 50.649.054.208,- atau terserap 97,23%, sementara realisasi belanja modal sebesar Rp. 346.265.355,- atau terserap 93,04%. Berikut ini disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi :

**Tabel. 2.1**

**Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023**

No	URUSAN PEMERINTAHAN	Perangkat Daerah	Kebijakan	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi					52.459.112.057		50.995.319.563	97,21			
				Belanja Operasi			52.086.956.311		50.649.054.208	97,23			
				Belanja Modal			372.155.746		346.265.355	93,04			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	BB	10.663.810.353	BB	9.996.888.868	93,75			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	83,5	77.024.994	83,7	71.321.960	92,60	100%		
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	4.623.150	2	4.214.600	91,16	100%	Sisa anggaran dikarenakan pencairan sesuai dengan peruntukannya	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	5	54.745.600	5	52.468.400	95,84	100%	Sisa anggaran dikarenakan pencairan sesuai dengan peruntukannya	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	5	5.681.994	5	5.505.400	96,89	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	3.072.480	1	2.318.400	75,46	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1	2.185.590	1	1.969.000	90,09	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	3.081.206	1	2.172.760	70,52	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	3.634.974	1	2.673.400	73,55	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>8.664.277.712</b>	<b>100%</b>	<b>8.134.788.446</b>	<b>93,89</b>	<b>100 %</b>		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81	8.166.322.290	69	7.647.664.306	93,65	100%	Sisa anggaran karena insentif triwulan III, IV tidak tercapai sehingga tidak dicairkan, dan adanya PNS yang	Melakukan penagihan retribusi kebersihan kepada pelaku kegiatan usaha



												dinas silpa dikarenakan biaya kontribusinya sudah habis.	
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>	<b>100 %</b>	<b>465.014.767</b>	<b>100%</b>	<b>446.753.074</b>	<b>96,07</b>	<b>100 %</b>		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	11.872.144	12	11.345.000	95,56	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	38.027.623	5	28.035.000	73,72	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	24.615.000	7	17.225.000	69,98	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	Menyesuaikan anggaran dengan kunjungan tamu
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	390.500.000	52	390.148.074	99,91	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				<b>Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>	<b>100 %</b>	<b>74.201.580</b>	<b>100</b>	<b>73.500.000</b>	<b>99,05</b>	<b>100</b>		
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	43.636.368	1	43.200.000	99,00	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	30.565.212	6	30.300.000	99,13	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>	<b>100 %</b>	<b>805.959.319</b>	<b>100%</b>	<b>767.404.553</b>	<b>95,22</b>	<b>100 %</b>		

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	-	0%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	389.560.000	1	381.977.358	98,05	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	149.741.319	5	123.244.010	82,30	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	266.658.000	4	262.183.185	98,32	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>	<b>100 %</b>	<b>326.311.981</b>	<b>100%</b>	<b>270.573.390</b>	<b>82,92</b>	<b>100 %</b>		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	281.507.300	73	228.727.590	81,25	100%	Sisa anggaran dikarenakan pajak beberapa kendaraan yang tidak bisa dibayarkan karna tidak ada BPKB.	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	43.139.681	23	40.245.800	93,29	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	1.665.000	1	1.600.000	96,10	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD</b>	<b>100 %</b>	<b>148.861.216</b>	<b>100%</b>	<b>147.809.000</b>	<b>99,29</b>	<b>100 %</b>		
				<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersusunya RPPLH Kota Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	0%	0	0	0	-	0%		
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota</b>	<b>Keselarasn Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Perencanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>148.861.216</b>	<b>100%</b>	<b>147.809.000</b>	<b>99,29</b>	<b>100 %</b>		
				Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	1	148.861.216	2	147.809.000	99,29	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ, serta adanya kegiatan cetak yang tidak diambil.	
				<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi</b>	<b>7</b>	<b>1.193.293.102</b>	<b>7</b>	<b>1.138.331.610</b>	<b>95,39</b>	<b>100%</b>		
				<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi</b>	<b>100 %</b>	<b>991.376.268</b>	<b>100%</b>	<b>956.131.124</b>	<b>96,44</b>	<b>100%</b>		
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	138.892.330	2	128.478.000	92,50	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	87.348.000	1	81.866.395	93,72	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	350	765.135.938	864	745.786.729	97,47	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi</b>	<b>100 %</b>	<b>178.179.334</b>	<b>100%</b>	<b>171.625.486</b>	<b>96,32</b>	<b>100 %</b>		

				Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	178.179.334	2	171.625.486	96,32	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>22,50%</b>	<b>23.737.500</b>	<b>-4,21</b>	<b>10.575.000</b>	<b>44,55</b>	<b>100%</b>		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1	23.737.500	1	10.575.000	44,55	100%	Sisa anggaran dikarenakan kegiatan hanya dilaksanakan 1 kali.	Menyesuaikan anggaran dengan kegiatan
				<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan</b>	<b>49,93</b>	<b>6.885.341.010</b>	<b>49,93</b>	<b>6.655.883.000</b>	<b>96,67</b>	<b>100%</b>		
				<b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi</b>	<b>11,28%</b>	<b>6.885.341.010</b>	<b>0,02%</b>	<b>6.655.883.000</b>	<b>96,67</b>	<b>100%</b>		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	77,7	839.756.900	77,7	812.884.400	96,80	100%	Sisa anggaran dikarenakan gaji PHL dicairkan sesuai kehadiran serta anggaran lainnya yang dicairkan sesuai SPJ.	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	971,18	5.591.990.015	157,56	5.405.714.600	96,67	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan, selisih harga BBM	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	58	453.594.095	112	437.284.000	96,40	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan	

												sesuai peruntukan.	
				<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)</b>	<b>100 %</b>	<b>48.035.300</b>	<b>100%</b>	<b>41.030.000</b>	<b>85,42</b>	<b>100%</b>		
				<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>Persentase penyimpanan sementara limbah B3</b>	<b>100 %</b>	<b>48.035.300</b>	<b>100%</b>	<b>41.030.000</b>	<b>85,42</b>	<b>100%</b>		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	63	39.035.300	101	36.680.000	93,97	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20	9.000.000	10	4.350.000	48,33	50%	Sisa anggaran dikarenakan anggaran perjalanan dinas digunakan sesuai dengan pengajuan dari perusahaan .	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha
				<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0	0	0	0	-			

				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</b>	100 %	191.324.000	100%	168.045.522	87,83	100%		
				<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup</b>	100 %	191.324.000	100%	168.045.522	87,83	100%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150	85.319.000	108	69.870.000	81,89	100%	Sisa anggaran dikarenakan adanya TKK yang resign dan gajinya tidak dibayarkan.	Koordinasi dengan DPMPSTP terkait izin yang telah dikeluarkan
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/pelatihan	1	18.000.000	7	10.483.222	58,24	100%	Sisa anggaran dikarenakan adanya bimtek yang dilaksanakan secara online serta biaya bimtek yang beberapa sudah ditanggung panitia.	
				Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	160	88.005.000	161	87.692.300	99,64	100%	Sisa anggaran dikarenakan sesuai SPJ.	
				<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>	100 %	72.613.895	100%	72.129.100	99,33	100%		

				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>	<b>100 %</b>	<b>72.613.895</b>	<b>100%</b>	<b>72.129.100</b>	<b>99,33</b>	<b>100%</b>		
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3	26.333.895	3	26.099.100	99,11	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	30	46.280.000	30	46.030.000	99,46	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup</b>	<b>100 %</b>	<b>136.310.500</b>	<b>100%</b>	<b>132.085.560</b>	<b>96,90</b>	<b>100%</b>		
				<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup</b>	<b>100 %</b>	<b>136.310.500</b>	<b>100%</b>	<b>132.085.560</b>	<b>96,90</b>	<b>100%</b>		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	35	14.330.000	25	10.530.000	73,48	100%	Sisa anggaran dikarenakan tidak adanya kasus yang memerlukan uji laboratorium.	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	18	121.980.500	8	121.555.560	99,65	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase pengelolaan persampahan</b>	<b>97,42%</b>	<b>33.119.522.681</b>	<b>96,41%</b>	<b>32.643.116.903</b>	<b>98,56</b>	<b>100%</b>		
				<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA</b>	<b>22,45%</b>	<b>33.119.522.681</b>	<b>22,46%</b>	<b>32.643.116.903</b>	<b>98,56</b>	<b>100%</b>		

				Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	864.145.725	1	849.586.935	98,32	100%	Sisa anggaran dikarenakan pembayaran gaji PHL disesuaikan dengan kehadiran, BBM mesin genset yang tidak dicairkan karena mesin genset rusak, serta tidak dilaksanakannya perbaikan balon gas WTE karena bahan yang digunakan dari Korea sehingga sulit untuk proses pengiriman.
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	116 484, 79	32.169.115.456	1197 23,96	31.709.957.968	98,57	100%	Sisa anggaran dikarenakan pembayaran gaji PHL disesuaikan dengan kehadiran, serta efisiensi akibat fluktuasi harga bbm.
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah	3	80.096.500	3	78.007.000	97,39	100%	Sisa anggaran dikarenakan dibayarkan

					Berbasis Masyarakat							sesuai SPJ.
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	6.165.000	1	5.565.000	90,27	100%	Sisa anggaran dikarenakan dibayarkan sesuai SPJ.

**Tabel 2.2**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Jambi**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>									
2.11.02	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD</b>	17,879,056	290,515,000	14,776,080.00	13,710,778.00	93%	7,950,000	312,175,778.00	1746%
2.11.02.2.01	<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</b>	<b>Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup</b>		93,215,000					93,215,000.00	
2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		93,215,000					93,215,000.00	

2.11.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Keselarasn penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dengan dokumen perencanaan	17,879,056	197,300,000	14,776,080.00	13,710,778.00	93%	7,950,000	218,960,778.00	1225%
2.11.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD	17,879,056	197,300,000	14,776,080.00	13,710,778.00	93%	7,950,000	218,960,778.00	1225%
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	2,102,726,716	3,115,051,958	1,828,778,165.00	1,755,960,427.00	96%	1,151,605,602	6,022,617,987.00	286%
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	1,626,443,993	1,194,436,443	1,376,039,610.00	1,334,286,227.00	97%	948,226,268	3,476,948,938.00	214%

2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup	330,431,058	24,430,000	156,076,120.00	151,240,000.00	97%	162,742,330	338,412,330.00	102%
2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian emisi GRK dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	276,224,500	35,848,500	54,480,447.00	49,263,016.00	90%	117,348,000	202,459,516.00	73%
2.11.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji	1,019,788,435	1,134,157,943	1,165,483,043.00	1,133,783,211.00	97%	668,135,938	2,936,077,092.00	288%
2.11.03.2.02	<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi</b>	<b>396,045,423</b>	<b>343,964,536</b>	<b>378,258,542.00</b>	<b>364,641,800.00</b>	<b>96%</b>	<b>178,179,334</b>	<b>886,785,670.00</b>	<b>224%</b>
2.11.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	396,045,423	343,964,536	378,258,542.00	364,641,800.00	96%	178,179,334	886,785,670.00	224%

2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	80,237,300	19,125,000	74,480,013.00	57,032,400.00	77%	25,200,000	101,357,400.00	126%
2.11.03.2.03.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemaran	80,237,300	19,125,000	74,480,013.00	57,032,400.00	77%	25,200,000	101,357,400.00	126%
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	9,033,242,720	7,155,086,698	7,783,655,760.00	7,654,792,957.00	98%	6,411,838,586	21,221,718,241.00	235%
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi	9,033,242,720	7,155,086,698	7,783,655,760.00	7,654,792,957.00	98%	6,411,838,586	21,221,718,241.00	235%
2.11.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah pengembangan dan pengelolaan taman hutan kota	1,462,995,900	976,972,569	1,219,187,527.00	1,197,892,260.00	98%	824,761,582	2,999,626,411.00	205%
2.11.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH taman hutan kota Jambi yang terkelola	6,949,419,300	5,861,626,886	6,136,665,780.00	6,038,893,830.00	98%	5,280,367,909	17,180,888,625.00	247%

2.11.04.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang di kelola	620,827,520	316,487,243	427,802,453.00	418,006,867.00	98%	306,709,095	1,041,203,205.00	168%
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	153,382,453	1,337,222,400	100,130,521.00	85,004,250.00	85%	133,634,690	1,555,861,340.00	1014%
2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	63,382,453	34,560,100	52,760,023.00	50,533,500.00	96%	48,035,300	133,128,900.00	210%
2.11.05.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan izin penyimpanan sementara limbah B3	53,287,643	25,077,100	40,762,087.00	38,858,500.00	95%	39,035,300	102,970,900.00	193%
2.11.05.2.01.02	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang terverifikasi	10,094,810	9,483,000	11,997,936.00	11,675,000.00	97%	9,000,000	30,158,000.00	299%

2.11.05.2.02	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 Medis Covid 19 yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	90,000,000	1,302,662,300	47,370,498.00	34,470,750.00	73%	85,599,390	1,422,732,440.00	1581%
2.11.05.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terkelolanya limbah B3 medis Covid 19 yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	90,000,000	1,302,662,300	47,370,498.00	34,470,750.00	73%	85,599,390	1,422,732,440.00	1581%
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	495,000,000	334,428,928	375,281,111.00	342,281,142.00	91%	188,353,000	865,063,070.00	175%
2.11.06.201	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	495,000,000	334,428,928	375,281,111.00	342,281,142.00	91%	188,353,000	865,063,070.00	175%

2.11.06.201.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah fasilitas kegiatan usaha didalam memenuhi kewajiban izin lingkungan atau izin PPLH	117,203,559	22,382,104	127,262,051.00	117,525,092.00	<b>92%</b>	84,719,000	224,626,196.00	<b>192%</b>
2.11.06.201.02	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan bintek bagi petugas pengawas	168,931,921	9,500,000	118,000,000.00	97,420,000.00	<b>83%</b>	14,630,000	121,550,000.00	<b>72%</b>
2.11.06.201.03	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengawasan	208,864,520	130,076,000	130,019,060.00	127,336,050.00	<b>98%</b>	89,004,000	346,416,050.00	<b>166%</b>
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	201,513,400	172,470,824	166,530,405.00	166,338,500.00	<b>100%</b>	26,333,895	365,143,219.00	<b>181%</b>
2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	201,513,400	172,470,824	166,530,405.00	166,338,500.00	<b>100%</b>	26,333,895	365,143,219.00	<b>181%</b>

2.11.08.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	143,000,000	140,014,544	129,800,000.00	129,700,000.00	100%	26,333,895	296,048,439.00	207%
2.11.08.2.01.01	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan kegiatan saka kalpataru	58,513,400	32,456,280	36,730,405.00	36,638,500.00	100%	0	69,094,780.00	118%
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	145,237,400	33,309,130,136	123,154,601.00	116,336,360.00	94%	76,310,500	33,501,776,996.00	23067%
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	145,237,400	33,309,130,136	123,154,601.00	116,336,360.00	94%	76,310,500	33,501,776,996.00	23067%
2.11.10.2.01.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat	47,665,200	17,918,690	29,575,651.00	26,810,210.00	91%	14,330,000	59,058,900.00	124%

2.11.10.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah penyelesaian sengketa	97,572,200	3,268,300	93,578,950.00	89,526,150.00	96%	61,980,500	154,774,950.00	159%
2.11.11	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase pengelolaan persampahan</b>	<b>38,903,623,522</b>	<b>33,287,943,146</b>	<b>32,101,551,442.00</b>	<b>31,586,863,517.00</b>	<b>98%</b>	<b>31,284,906,732</b>	<b>96,159,713,395.00</b>	<b>247%</b>
2.11.11.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA</b>	<b>38,903,623,522</b>	<b>33,287,943,146</b>	<b>32,101,551,442.00</b>	<b>31,586,863,517.00</b>	<b>98%</b>	<b>31,284,906,732</b>	<b>96,159,713,395.00</b>	<b>247%</b>
2.11.11.2.01.02	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengurangan sampah ditingkat sumber	1,210,000,000	753,853,312	904,277,586.00	874,326,668.00	97%	864,145,725	2,492,325,705.00	206%
2.11.11.2.01.03	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sampah yang ditangani	37,594,752,172	32,524,489,834	31,151,948,856.00	30,681,736,989.00	98%	30,334,499,507	93,540,726,330.00	249%

2.11.11.2.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pelatihan pendaur ulangan sampah	82,836,683	4,500,000	25,300,000.00	18,049,860.00	71%	80,096,500	102,646,360.00	124%
2.11.11.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	16,034,667	3,750,000	20,025,000.00	12,750,000.00	64%	6,165,000	22,665,000.00	141%
2.11.11.2.01.06	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan		1,350,000					1,350,000.00	

---

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas, pelayanan dibidang lingkungan hidup terdiri dari :

### 1. Indikator Kinerja Kunci

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- b. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### 2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

- a. Hasil perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
- b. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Data Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- d. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.
- g. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kab/Kota yang ditangani.
- h. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat.

**Tabel 2.3**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi**

No	Indikator IKU, IKK	Target IKU, IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,21	59,47	59,63	59,80	59,15	57,09	62,98	63,18	
2.	Indeks Kualitas Air	40,05	43,50	44,00	44,50	42,50	35,19	43,50	44,00	
3.	Indeks Kualitas Udara	80,78	88,11	88,12	88,13	88,09	88,52	88,11	88,12	
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,90	49,97	49,99	50,02	49,92	49,93	49,97	49,99	
5.	Persentase Jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	14,23 %	23 %	23,25 %	23,50 %	22,45%	22,46%	23 %	23,25 %	
6.	Persentase jumlah sampah yang ditangani	76,66 %	74,75 %	74,75 %	74,75 %	74,97%	73,95%	74,75 %	74,75 %	
7.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Jambi	90.89 %	97,75 %	98%	98,25 %	97,42%	96.41%	97,75 %	98%	
8.	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota					95% tidak taat 5% taat	88% tidak taat 12% taat			
9.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kab/Kota					Persentase penanganan sampah 74,97% dimana jumlah penanganan sampah 119.723, 96 terhadap timbulan sampah 159.668, 01	Persentase penanganan sampah 73.95%, dimana jumlah penanganan sampah 119.723, 96 terhadap timbulan sampah 161.897, 58			

10.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota					90,6%	100%			
11.	Rasio pejabat pengawas LH didaerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota					13,8%	8,50%			
12.	Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kab/Kota					0%	0%			
13.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH					0%	0%			
14.	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kab/Kota yang ditangani					100%	100%			
15.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat					0%	100%			

---

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan gambaran umum pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup pada uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelompokkan isu-isu strategi lingkungan hidup Kota Jambi. Dari kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup dan isu strategis di dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RTRW 2013-2033, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dapat dikelompokkan menjadi beberapa isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Permasalahan pencemaran lingkungan (air, udara dan kerusakan tanah).
2. Permasalahan lingkungan perkotaan (tata ruang dan persampahan).
3. Permasalahan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
4. Permasalahan pengelolaan sungai dan danau.
5. Permasalahan pembentukan Peraturan Perundangan tentang Lingkungan Hidup di daerah.
6. Permasalahan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pembinaan, pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum lingkungan.
7. Permasalahan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
8. Permasalahan partisipasi dan peran serta masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi antara lain:

- a. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumberdaya alam.
- b. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
- c. Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.

- 
- d. Lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan dan belum adanya peraturan daerah yang cukup memadai tentang pengelolaan lingkungan di Kota Jambi serta kurangnya koordinasi antar sektor.
  - e. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
  - f. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.
  - g. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.

Dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Layanan rekomendasi surat keterangan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan.
- b. Layanan informasi pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Layanan jasa analisa laboratorium lingkungan.
- d. Pembinaan pengawasan dan pemantauan kegiatan/usaha.
- e. Layanan pengujian kualitas gas buang kendaraan bermotor (uji emisi).
- f. Layanan status mutu kualitas air limbah.
- g. Layanan pos pengaduan sengketa lingkungan.
- h. Adanya potensi pengelolaan air limbah rumah tangga yang belum ditangani secara optimal.
- i. Adanya teknologi daur ulang sampah.
- j. Masih adanya lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk pembuatan taman.
- k. Perda dan Perwal tentang pengelolaan lingkungan hidup.

#### **2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Reviu rancangan PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023 akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup

---

tahun 2023, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Urusan Lingkungan Hidup		Kota Jambi		75.247.967.299			Kota Jambi		57.999.116.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah		BB	14.909.409.195	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah		BB	13.876.238.449
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP		70 Nilai	94.998.077	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP		70 Nilai	84.432.221
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2 Dokumen	9.297.434	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2 Dokumen	29.909.701
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5 Dokumen	60.220.160	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	39.015.125
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5 Dokumen	2.857.972	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	5.321.544	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	5.445.327

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	5.138.749	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			4.609.565
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	5.628.484	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	5.452.503
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	6.533.734	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	<b>10.778.073.884</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>11.754.830.578</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi keuangan</b>		<b>100%</b>	10.149.934.384
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		81 Orang	11.130.847.339	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		81 Orang	608.140.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		250 Dokumen	607.415.160	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	5.445.327
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	9.092.825	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	13.323.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3 Laporan	7.475.254	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3 Laporan	6.676.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah		<b>100%</b>	<b>75.939.600</b>	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah		<b>100%</b>	<b>40.800.000</b>

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		9 Orang	75.939.600	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		9 Laporan	40.800.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Index profesionalitas ASN perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>411.891.260</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Index profesionalitas ASN perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>348.940.000</b>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		164 stel	163.713.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		164 paket	195.360.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		13 Kali	248.178.260	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		11 Orang	153.580.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>		<b>100%</b>	<b>654.112.713</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>		<b>100%</b>	<b>444.117.339</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4 paket	17.247.182	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2 paket	13.274.275
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 paket	41.243.031	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	28.978.064
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	29.040.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	18.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	566.582.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	383.865.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>		<b>100%</b>	<b>254.270.368</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>		<b>100%</b>	<b>507.947.293</b>

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		25 unit	137.178.184	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			120.872.340
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		9 unit	117.092.184	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		911 unit	387.074.953
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>		<b>100%</b>	<b>937.843.944</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>		<b>100%</b>	<b>726.398.212</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai		800 pcs	9.680.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Tahun	529.254.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	426.100.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Laporan	77.161.264	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		5 Laporan	84.365.612
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Orang	321.748.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	215.932.600
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>		<b>100%</b>	<b>725.522.655</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>		<b>100%</b>	<b>945.529.500</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		20 Unit	364.390.411	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		20 Unit	285.140.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	63.472.244	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	53.259.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 paket	297.660.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	607.130.000
						Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	Kota Jambi	100%	741.446.000
						Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Kota Jambi	1 unit	741.446.000
2	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD</b>			<b>17.879.056</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD</b>		<b>100%</b>	<b>667.949.916</b>
	<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup</b>				<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup</b>		100%	<b>349.999.130</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)		1 Dokumen	349.999.130
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Keselarasan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dengan dokumen perencanaan</b>		<b>100%</b>	<b>17.879.056</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Keselarasan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dengan dokumen perencanaan</b>		<b>100%</b>	<b>317.950.786</b>
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD		1 dokumen	17.879.056	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun		1 dokumen	317.950.786

	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan divaluasi				Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan divaluasi			
3	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi</b>		<b>7 Nilai</b>	<b>2.357.684.403</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi</b>		<b>7 Nilai</b>	<b>1.521.955.774</b>
	<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi</b>		<b>100%</b>	<b>1.860.401.680</b>	<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi</b>		<b>100%</b>	<b>1.475.663.554</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		2 dokumen	350.431.058	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		2 dokumen	87.186.650
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 dokumen	286.224.500	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				Sub Kegiatan Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kota Jambi	1 dokumen	48.637.450

	Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		2 dokumen	435.183.410
	Sub Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				Sub Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		1 Dokumen	79.615.945
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		1 Dokumen	80.617.400
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		350 dokumen	1.223.746.122	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		12 Dokumen	744.422.699
	<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi</b>		<b>100%</b>	<b>397.045.423</b>	<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi</b>		<b>100%</b>	<b>4.697.220</b>
	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		2 Laporan	397.045.423	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		2 Laporan	4.697.220

	<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>		<b>0,27%</b>	<b>100.237.300</b>	<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>		<b>0,40%</b>	<b>41.595.000</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		1 Dokumen	100.237.300	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		1 Dokumen	
	Sub Pelaksanaan Kegiatan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota					Sub Pelaksanaan Kegiatan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		300 M2	41.595.000
<b>4</b>	<b>Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan</b>		<b>49,99</b>	<b>9.705.681.420</b>	<b>Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan</b>		<b>49,99</b>	<b>7.296.050.632</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase peningkatan pengelolaan keaneekaragaman hayati RTH Kota Jambi</b>		<b>0,04%</b>	<b>9.705.681.420</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase peningkatan pengelolaan keaneekaragaman hayati RTH Kota Jambi</b>		<b>0,04%</b>	<b>7.296.050.632</b>
	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		77,7 ha	1.609.295.400	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Unit	1.410.093.032
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		1718,56 Ha	7.475.558.500	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		971.18 Ha	5.545.612.834

	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang di kelola		62 Unit	620.827.520	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang di kelola		53 Unit	340.344.766
5	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)</b>		100%	<b>69.300.000</b>	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)</b>		100%	<b>43.132.495</b>
	<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>Persentase penyimpanan sementara limbah B3</b>		100%	<b>69.300.000</b>	<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>Persentase penyimpanan sementara limbah B3</b>		100%	17.783.625
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		15 Dokumen	58.300.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		15 Dokumen	12.673.125
	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		10 Dokumen	11.000.000	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		10 Dokumen	5.110.500
	<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan limbah B3 Medis Covid 19 yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan</b>				<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota</b>		100%	25.348.870
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi			

	Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			
	Sub Kegiatan Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				Sub Kegiatan Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	100 Usaha		25.348.870
6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</b>	<b>100%</b>	<b>544.499.999</b>		<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</b>	<b>100%</b>		<b>275.073.166</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup</b>	<b>31%</b>	<b>544.499.999</b>		<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup</b>	<b>30%</b>		<b>275.073.166</b>
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 dokumen	128.923.914		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 dokumen		103.671.651

	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/ pelatihan		10 orang	185.825.113	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/ pelatihan		4 orang	47.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		160 laporan	229.750.972	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		160 Badan Usaha	124.401.515
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	513.325.000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	136.578.780
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	513.325.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	136.578.780
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		7 lembaga	300.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		3 lembaga	55.500.000

	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		3 Dokumen	213.325.000	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		2 Dokumen	81.078.780
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup		100%	295.840.000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup		100%	
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		100%	295.840.000	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		100%	
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		30 dunia pendidikan/3 kantor/du ta lingkungan	295.840.000	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		30 dunia pendidikan/3 kantor/du ta lingkungan	
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	150.000.000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	116.212.705

	<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup</b>		<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup</b>		<b>100%</b>	<b>116.212.705</b>
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLHKabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani		35 Dokumen	50.000.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		35 Pengaduan	21.356.195
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		15 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			
	Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		18 Perkara	94.856.510
10	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase pengelolaan persampahan</b>		<b>98%</b>	<b>46.684.348.226</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase pengelolaan persampahan</b>		<b>98%</b>	<b>33.324.478.083</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA</b>		<b>23,25%</b>	<b>46.684.348.226</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA</b>		<b>23,25%</b>	<b>33.324.478.083</b>

	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		1 Laporan	1.452.000.000	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			
	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendaauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang				Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendaauran ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang		11416,94 Ton	1.117.168.098
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Sampah Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		118.957,78 ton/tahun	45.113.702.606	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Sampah Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		116613,84 Ton	24.837.893.973
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		2 kelompok	99.404.020	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		2 kelompok	52.843.400

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		1 Dokumen	19.241.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		1 Dokumen	6.064.950
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		200.000 Ton	7.310.507.662
					<b>75.247.967.299</b>					<b>57.999.116.000</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang tertuang pada Forum OPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2.5**

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Limbah Medis			1 kali	
2	Pembangunan TPS Baru dan Rehab TPS di wilayah Kec. Pelayangan	Kecamatan Pelayangan		5 unit	
3	Pembangunan Taman/RTH	Komplek Rukan Kel. Mudung Laut		1 Paket	
4	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Kecamatan Pelayangan		1 kali	
5	Pembangunan TPS di Jalan Lintas menuju jembatan aur duri I	Kelurahan Penyengat Rendah		1 unit	
6	Perbaikan TPS di dekat Restoran IGO dan di depan Kantor BKKBN Provinsi	Kecamatan Telanaipura		2 unit	
7	Sosialisasi pemilahan sampah di setiap Kelurahan	Kecamatan Telanaipura		7 kali	
8	Penambahan dan Perbaikan TPS	Kecamatan Pasar		3 unit	
9	Penambahan TPS di sebelah Kantor Lurah Tambak sari dan Perbaikan TPS di Lorong Darma 1 dan 2	Kecamatan Jambi Selatan		3 unit	
10	Pembangunan TPS di tanjung lumut, belakang Bandara dan di SPBU Lingkar Selatan.	Kecamatan Paal Merah		3 unit	
11	Pengadaan tong sampah roda	Kecamatan Jelutung		6 unit	
12	Gerobak sampah	Kecamatan Jelutung		6 unit	
13	Tempat sampah			1 buah	
14	Pembangunan Taman di depan Hotel ONE Pasar Angso Duo.	Kecamatan Pasar.		1 paket	

---

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam upaya mencapai visi tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan visi dan misi pembangunan nasional, maka visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu **“terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”**. Dengan memperhatikan misi ke-4 pembangunan nasional, dan berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, maka misi KLHK yaitu :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Prioritas dan sasaran daerah dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
Prioritas dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan yang Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan

					Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
--	--	--	--	--	-----------------------------------

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan. Adapun Sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Tabel 3.2**  
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan DLH Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,16

**Tabel 3.3**  
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran DLH Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan yang Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Air	46,72
		Indeks Kualitas Udara	90
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50,89
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	56,5

---

**Tabel 3.4**  
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Kinerja Utama DLH Tahun 2025</b>
(1)	(2)	(3)
1	Indeks Kualitas Air	46,72
2	Indeks Kualitas Udara	90
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50,89
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	56,5

---

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Program merupakan implementasi dari strategi organisasi, yaitu proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Program	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Kegiatan	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Kegiatan	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

		<p>Kegiatan 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>4. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
		<p>Kegiatan 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Sub Kegiatan 1. Pengadaan Mebel</p> <p>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>
		<p>Kegiatan 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
		<p>Kegiatan 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
		<p>Program 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p>
		<p>Kegiatan 9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</p>

	Sub Kegiatan	1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
	Kegiatan	10. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 1. Pemantauan dan Evaluasi KLHS
	Program	3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Kegiatan	11. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK 5. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 6. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 7. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 8. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
	Kegiatan	12. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan

		Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Kegiatan	13.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
	2.	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemaran
Program	4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Kegiatan	14.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
	2.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	3.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
Program	5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Kegiatan	15.	Penyimpanan Sementara Limbah B3
Sub Kegiatan	1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	2.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
	3.	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
Kegiatan	16.	Pengumpul Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi

			dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
		Program	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Kegiatan	17. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</li> <li>2. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</li> </ol>
		Program	7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Kegiatan	18. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</li> <li>2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</li> </ol>
		Program	8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

		<p>Kegiatan 19. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan 1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>
		<p>Program 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan 20. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan 1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</p> <p>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan</p> <p>3. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</p>
		<p>Program 10. Program Pengelolaan Persampahan</p> <p>Kegiatan 21. Pengelolaan Sampah</p> <p>Sub Kegiatan 1. Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah</p> <p>2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan</p> <p>4. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA TPST kabupaten kota atau TPA TPST Regional</p> <p>5. Penanganan sampah melalui pengangkutan</p>

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025  
dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

**Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				<b>57.999.116.000</b>	APBD			<b>91.294.791.658</b>
2.11.01	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah		<b>BB</b>	<b>13.876.238.449</b>	APBD		<b>BB</b>	<b>16.400.350.110</b>
2.11.01.2.01	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP		<b>70 Nilai</b>	<b>84.432.221</b>	APBD		<b>70 Nilai</b>	<b>104.497.884</b>
2.11.01.2.01.01	Sub Kegiatan	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	2 Dokumen	29.909.701	APBD		2 Dokumen	10.227.178

2.11.01.2 .01.02	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Jambi	2 Dokumen	39.015.125	APBD		5 Dokumen	69.385.945
2.11.01.2 .01.04	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	5.445.327	APBD		1 Dokumen	11.506.322
2.11.01.2 .01.06	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	4.609.565	APBD		1 Laporan	6.191.333
2.11.01.2 .01.07	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	1 Laporan	5.452.503	APBD		1 Dokumen	7.187.107
2.11.01.2 .02	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan		<b>100%</b>	<b>10.778.073.884</b>	<b>APBD/DAU</b>		<b>100%</b>	<b>12.930.313.634</b>
2.11.01.2 .02.01	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	81 Orang	10.149.934.384	DAU		81 Orang/Bulan	12.243.932.072
2.11.01.2 .02.03	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	12 Dokumen	608.140.000	APBD		250 Dokumen	688.156.676

2.11.01.2 .02.04	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Jambi	12 Dokumen	13.323.500	APBD		12 Dokumen	10.002.107
2.11.01.2 .02.05	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jambi	3 Laporan	6.676.000	APBD		3 Laporan	8.222.779
2.11.01.2 .03	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah		<b>100%</b>	<b>40.800.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>83.533.560</b>
2.11.01.2 .03.6	Sub Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Jambi	9 Laporan	40.800.000	APBD		9 Laporan	83.533.560
2.11.01.2 .05	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah		<b>100%</b>	<b>348.940.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>453.080.386</b>
2.11.01.2 .05.02	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Jambi	164 paket	195.360.000	APBD		164 Paket	180.084.300
2.11.01.2 .05.09	Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Jambi	11 Orang	153.580.000	APBD		13 orang	272.996.086
2.11.01.2 .06	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		<b>100%</b>	<b>444.117.339</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>719.523.984</b>

2.11.01.2 .06.01	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	2 paket	13.274.275	APBD		4 Paket	18.971.900
2.11.01.2 .06.03	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Kota Jambi			APBD		11 jenis	
2.11.01.2 .06.05	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Jambi	2 paket	28.978.064	APBD		3 Paket	45.367.334
2.11.01.2 .06.08	Sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	1 Laporan	18.000.000	APBD		1 Laporan	31.944.000
2.11.01.2 .06.09	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	20 Laporan	383.865.000	APBD		20 Laporan	623.240.750
2.11.01.2 .07	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		<b>100%</b>	<b>507.947.293</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>279.697.404</b>
2.11.01.2 .07.05	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang Disediakan	Kota Jambi	90 unit	120.872.340	APBD		25 unit	150.896.002
2.11.01.2 .07.06	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Jambi	32 unit	387.074.953	APBD		9 unit	128.801.402
2.11.01.2 .08	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		<b>100%</b>	<b>726.398.212</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.031.628.338</b>
2.11.01.2 .08.01	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi			APBD		800 Laporan	10.648.000

2.11.01.2 .08.02	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Jambi	1 Laporan	426.100.000	APBD		1 Laporan	582.179.400
2.11.01.2 .08.03	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	5 Laporan	84.365.612	APBD		5 Laporan	84.877.390
2.11.01.2 .08.04	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	4 Laporan	215.932.600	APBD		4 Laporan	353.923.548
2.11.01.2 .09	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum		<b>100%</b>	<b>945.529.500</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>798.074.920</b>
2.11.01.2 .09.02	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Jambi	20 Unit	285.140.500	APBD		20 Unit	400.829.452
2.11.01.2 .09.06	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Jambi	50 Unit	53.259.000	APBD		50 Unit	69.819.468

2.11.01.2 .09.09	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Jambi	1 unit	607.130.000	APBD		6 Unit	327.426.000
2.11.01.2 .10	Kegiatan	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	Kota Jambi	100%	741.446.000				
2.11.01.2 .10.0001	Sub Kegiatan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Kota Jambi	1 unit	741.446.000				
<b>2.11.02</b>	<b>Program</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD</b>		<b>100%</b>	<b>667.949.916</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>
2.11.02.2 .01	Kegiatan	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup		100%	<b>349.999.130</b>	APBD		100%	
2.11.02.2 .01.01	Sub Kegiatan	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kota Jambi	1 Dokumen	349.999.130	APBD			
2.11.02.2 .02	Kegiatan	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup dengan RPJPD/RPJMD		100%	317.950.786	APBD		100%	20.000.000

2.11.02.2 .02.04	Sub Kegiatan	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi		1 dokumen		APBD			
2.11.02.2 .02.02	Sub Kegiatan	Pembuatan dan Pelaksanaan RPJPD/RPJMD dan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Jambi		317.950.786	APBD		1 Dokumen	20.000.000
<b>2.11.03</b>	<b>Program</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>	<b>Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi</b>		<b>7 Nilai</b>	<b>1.521.955.774</b>	APBD		<b>7 Nilai</b>	<b>2.643.433.627</b>
2.11.03.2 .01	Kegiatan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi		100%	1.475.663.554	APBD		100%	2.125.150.904
2.11.03.2 .01.01	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Jambi	2 dokumen	87.186.650	APBD		2 Dokumen	360.431.058

2.11.03.2 .01.02	Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				APBD		1 Dokumen	296.224.500
2.11.03.2 .01.0005	Sub Kegiatan	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Kota Jambi	1 dokumen	48.637.450	APBD			
2.11.03.2 .01.0007	Sub Kegiatan	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		2 Dokumen	435.183.410	APBD			
2.11.03.2 .01.11	Sub Kegiatan	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.		1 Dokumen	79.615.945	APBD			

	Sub Kegiatan	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		1 Dokumen	80.617.400	APBD			
2.11.03.2.01.0015	Sub Kegiatan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		12 Dokumen	744.422.699	APBD		350 Dokumen	1.468.495.346
2.11.03.2.02	Kegiatan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi		<b>100%</b>	<b>4.697.220</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>398.045.423</b>
2.11.03.2.02.0001	Sub Kegiatan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kota Jambi	2 Laporan	4.697.220	APBD		2 Laporan	398.045.423
2.11.03.2.03	Kegiatan	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup		<b>0,40%</b>	<b>41.595.000</b>	<b>APBD</b>		<b>0.40%</b>	<b>120.237.300</b>
2.11.03.2.03.0011	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan	Kota Jambi	300 M2	41.595.000	APBD		1 Dokumen	120.237.300

			kabupaten/kota							
<b>2.11.04</b>	<b>Program</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan</b>		<b>49,99</b>	<b>7.296.050.632</b>	<b>APBD</b>		<b>42,50 Nilai</b>	<b>9.866.610.920</b>
2.11.04.2 .0001	Kegiatan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi		0,04%	7.296.050.632	APBD		0.06%	9.866.610.920
2.11.04.2 .01.0002	Sub Kegiatan	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	3 Unit	1.410.093.032	APBD		77.7 Ha	1.770.224.900
2.11.04.2 .01.0004	Sub Kegiatan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	971.18 Ha	5.545.612.834	APBD		1718,56 Ha	7.475.558.500
2.11.04.2 .01.07	Sub Kegiatan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kota Jambi	53 Unit	340.344.766	APBD		65 Unit	620.827.520

2.11.05	Program	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)		100%	43.132.495	APBD		100%	76.630.000
2.11.05.2.01	Kegiatan	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3		100%	17.783.625	APBD		100%	76.630.000
2.11.05.2.01.01	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Jambi	15 Dokumen	12.673.125	APBD		18 Dokumen	64.130.000

2.11.05.2 .01.02	Sub Kegiatan	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kota Jambi	10 Dokumen	5.110.500	APBD		10 Dokumen	12.500.000
2.11.05.2 .02	Kegiatan	Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Kota Jambi	100%	25.348.870	APBD			
2.11.05.2 .02.02	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan .	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kota Jambi			APBD			

2.11.05.2 .02.0004	Sub Kegiatan	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina		100 Usaha	25.348.870	APBD			
<b>2.11.06</b>	<b>Program</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</b>		<b>100%</b>	<b>275.073.166</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>598.949.306</b>
2.11.06.2 01	Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup		30%	275.073.166	APBD		30%	598.949.306
2.11.06.2 01.0001	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kota Jambi	150 dokumen	103.671.651	APBD		150 Dokumen	141.816.306
2.11.06.2 01.0005	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Jambi	4 orang	47.000.000	APBD		10 Orang	204.407.624

2.11.06.2 .01.0007	Sub Kegiatan	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Jambi	160 Badan Usaha	124.401.515	APBD		160 Laporan	252.726.069
2.11.08	Program	<b>Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>		100%	136.578.780	APBD		100%	553.325.000
2.11.08.2 .01	Kegiatan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	136.578.780	APBD		100%	553.325.000
2.11.08.2 .01.01	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kota Jambi	3 lembaga	55.500.000	APBD		9 Lembaga	300.000.000
2.11.08.2 .01.01	Sub Kegiatan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Jambi	2 Dokumen	81.078.780	APBD		3 Dokumen	253.325.000

2.11.09	Program	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup		100%		APBD		100%	295.840.000
2.11.09.2.01	Kegiatan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penerima penghargaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup		100%		APBD		100%	295.840.000
2.11.09.2.01.01	Sub Kegiatan	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		30 dunia pendidikan/ 3 kantor/duta lingkungan		APBD			295.840.000
2.11.10	Program	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	116.212.705	APBD		100%	150.000.000
2.11.10.2.01	Kegiatan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	116.212.705	APBD		100%	150.000.000
2.11.10.2.01.0004	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kota Jambi	35 Pengaduan	21.356.195	APBD		35 Dokumen	50.000.000

2.11.10.2 .01.0006	Sub Kegiatan	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		18 Perkara	94.856.510	APBD		15 Perkara	100.000.000
<b>2.11.11</b>	<b>Program</b>	<b>Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase pengelolaan persampahan</b>	Kota Jambi	98%	<b>33.324.478.083</b>	<b>APBD</b>		<b>98.25%</b>	<b>60.689.652.694</b>
2.11.11.2 .01	Kegiatan	Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	Kota Jambi	23,25%	33.324.478.083	APBD		23%	60.689.652.694
2.11.11.2 .01.0019	Sub Kegiatan	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kota Jambi	2 kelompok	52.843.400	APBD		2 Kelompok	25.014.0811
2.11.11.2 .01.0004	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kota Jambi	1 Dokumen	6.064.950	APBD		1 Dokumen	29.225.225

2.11.11.2 .01.0005	Sub Kegiatan	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kota Jambi			APBD			
2.11.11.2 .01.0021	Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir	Kota Jambi			APBD			
2.11.11.2 .01.0007	Sub Kegiatan	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kota Jambi	116613.84 Ton	24.837.893.973	APBD		118.957,78 Ton	48.647.813.388
2.11.11.2 .01.12	Sub Kegiatan	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Kota Jambi	11416,94 Ton	1.117.168.098	APBD			1.887.600.000
2.11.11.2 .01.19	Sub Kegiatan	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kota Jambi	200.000 Ton	7.310.507.662	APBD		200.000 Ton	10.000.000.000
		<b>Total</b>				<b>57.999.116.000</b>				<b>91.314.792.351</b>

---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini yang merupakan rangkaian rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk tahun 2025. Renja Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah. Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 mempedomani Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan demikian diharapkan pula agar program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2025 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik demi tercapainya tujuan strategis.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.